



Pemberdayaan Perpustakaan Umum: Peningkatan Literasi dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital

Muhammad Rizky¹⁾, Putri Yulia^{2*)}, Ziqri Armino³⁾, M. Tengku Alamsyah Nasfio⁴⁾,
Syahidatul Nabila⁵⁾, Feby Awalia Aziz⁶⁾, Fibrika Wahyuni Putri⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Koresponden: putriyulia@uinib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32939/rgk.v6i1.6619>

Abstract

Public libraries play a strategic role in increasing literacy and community participation, serving not only as book repositories but also as learning centers and inclusive social spaces. This study aims to analyze the inclusive outreach strategies implemented by public libraries in the digital era to promote literacy and community engagement. The method used is a problem-based participatory approach, where the community and library managers are actively involved in all stages of the activity. Key informants consisted of village library managers and community users of library services who were directly involved in the activity. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through coding, thematic analysis, source triangulation, and drawing conclusions to ensure the validity of the findings. The results of the activity showed an increase in visits and community engagement, marked by an increase in average weekly library visits from 22 people before the program to 38 people after the intervention, an increase of approximately 72.7%. Qualitatively, there were changes in community behavior in the use of technology, such as the ability to access online information, use public service applications, and utilize digital libraries more independently. In addition, libraries have undergone a functional transformation into inclusive social spaces that encourage community interaction and shared learning activities. This program demonstrates that a social inclusion-based library approach is effective in improving digital literacy in rural communities and strengthening the role of libraries as centers for community-based lifelong learning.

Keywords: Public Libraries; Inclusive Socialization; Digital Literacy; Community Participation

Abstrak

Perpustakaan umum memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan ruang sosial inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi sosialisasi inklusif yang diterapkan perpustakaan umum dalam menghadapi era digital untuk mendorong literasi dan keterlibatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis masalah (*problem-based approach*), dimana masyarakat dan pengelola perpustakaan dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Informan utama terdiri atas pengelola perpustakaan nagari dan masyarakat pengguna layanan perpustakaan yang terlibat langsung dalam kegiatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengkodean, analisis tematik, triangulasi sumber, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan validitas temuan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kunjungan dan keterlibatan masyarakat, ditandai dengan kenaikan rata-rata kunjungan mingguan perpustakaan dari 22 orang sebelum program menjadi 38 orang setelah intervensi atau meningkat sekitar 72,7%. Secara kualitatif, terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi, seperti kemampuan mengakses informasi daring, menggunakan aplikasi layanan publik, serta memanfaatkan perpustakaan digital secara lebih mandiri. Selain itu, perpustakaan mengalami transformasi fungsi menjadi ruang sosial inklusif yang mendorong interaksi komunitas dan kegiatan pembelajaran bersama. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan

perpustakaan berbasis inklusi sosial efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat berbasis komunitas.
Kata kunci: Perpustakaan Umum; Sosialisasi Inklusif; Literasi Digital; Partisipasi Masyarakat

Pendahuluan

Perpustakaan umum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang melek informasi dan literasi. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi perpustakaan kini dituntut untuk menjadi ruang belajar yang terbuka dan inklusif bagi semua kalangan. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin menekankan keterbukaan akses informasi dan kesetaraan layanan publik. Menurut (N. Lestari, 2021), perpustakaan umum di era modern bukan hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi, tetapi juga sebagai pusat literasi yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini membuat perpustakaan harus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Di sisi lain, sosialisasi menjadi strategi penting yang dapat digunakan perpustakaan untuk memperkenalkan layanan dan kegiatan yang mereka miliki. Melalui kegiatan sosialisasi yang inklusif, perpustakaan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang beragam, termasuk kelompok yang sebelumnya kurang terlibat. Studi yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara kreatif mampu meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum hingga 30%. Artinya, peran perpustakaan tidak hanya sebatas menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi melalui kegiatan komunikasi yang efektif.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang besar bagi perpustakaan untuk memperluas jangkauan sosialisasinya. Media sosial, website resmi, maupun aplikasi berbasis teknologi dapat digunakan untuk menghubungkan perpustakaan dengan masyarakat. Menurut (A. Putri & Santoso, 2023), pemanfaatan media digital dalam sosialisasi perpustakaan mampu meningkatkan keterlibatan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan pendekatan ini, perpustakaan umum dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pusat literasi. Konsep inklusivitas dalam perpustakaan juga menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Inklusif berarti perpustakaan harus mampu melayani semua golongan tanpa diskriminasi, baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan, status sosial, maupun kemampuan ekonomi. Penelitian oleh (R. Hidayat, 2024) menekankan bahwa perpustakaan inklusif dapat menjadi ruang sosial yang mengurangi kesenjangan pengetahuan antar kelompok masyarakat. Dengan cara ini, perpustakaan umum dapat berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penyedia informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang nyata.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perpustakaan umum dapat mengembangkan strategi sosialisasi inklusif yang inovatif dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Fokus pada pendekatan inovatif akan membuat perpustakaan mampu menghadapi tantangan era digital sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan strategi yang tepat, perpustakaan umum bisa menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat dan ruang kebersamaan yang mampu menjembatani perbedaan sosial (Suryani, 2025). Dalam perkembangan masyarakat digital, peran perpustakaan mengalami transformasi dari sekadar penyedia koleksi informasi menjadi agen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas literasi, keterampilan teknologi, dan partisipasi sosial masyarakat. Perspektif global yang dikembangkan oleh UNESCO dan *International Federation of Library Associations and Institutions* menekankan bahwa perpustakaan publik berkontribusi terhadap pembangunan inklusif melalui penyediaan akses informasi yang merata, peningkatan kompetensi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial berbasis pengetahuan (Samon & Rukmana, 2025). Namun demikian, implementasi fungsi tersebut pada tingkat lokal,

khususnya wilayah non-perkotaan, masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural.

Secara nasional, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih menjadi perhatian. Data *Programme for International Student Assessment* yang diselenggarakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* menunjukkan bahwa kemampuan membaca peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (Pratiwi, 2022). Selain itu, data nasional menunjukkan bahwa indeks kegemaran membaca masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, dengan ketimpangan akses literasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (fatmawati, 2022). Di sisi lain, penetrasi internet yang meningkat belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga penggunaan teknologi lebih dominan untuk hiburan dibandingkan pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran publik masih sangat relevan dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat.

Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendekatan inklusi sosial (*social inclusion*) dan keterlibatan komunitas (*community engagement*), di mana perpustakaan berperan sebagai ruang kolaboratif antara institusi dan masyarakat dalam membangun kapasitas sosial. Namun, integrasi perspektif teoretis tersebut dalam konteks perpustakaan daerah di Indonesia, khususnya pada level nagari atau desa, masih terbatas. Dengan demikian, belum adanya model pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement* yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal serta diuji melalui pendekatan problem-based pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pendekatan inklusi sosial dalam kegiatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perpustakaan dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok dengan keterbatasan akses informasi dan teknologi, sehingga perpustakaan menjadi ruang yang terbuka, setara, dan memberdayakan. Sementara itu, pendekatan *community engagement* menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perpustakaan, sehingga kegiatan yang dikembangkan tidak bersifat top-down tetapi berbasis kebutuhan nyata komunitas. Integrasi kedua perspektif tersebut diharapkan mampu meningkatkan relevansi program perpustakaan sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap institusi perpustakaan.

Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis kondisi pemanfaatan perpustakaan dan tingkat partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan masyarakat terkait literasi dan akses informasi digital, serta mengembangkan model pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement* yang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap permasalahan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model konseptual pemberdayaan perpustakaan yang dapat direplikasi pada konteks wilayah serupa. Dengan demikian, kegiatan ini menempatkan perpustakaan umum sebagai ruang strategis pemberdayaan masyarakat di era digital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial, pembelajaran kolaboratif, dan penguatan kapasitas komunitas secara berkelanjutan. Pendekatan *problem-based* yang digunakan dalam kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis dan praktik lapangan, sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai agen pembangunan sosial di tingkat lokal.

Identifikasi Masalah

Perpustakaan umum secara konseptual merupakan institusi publik yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, penguatan literasi, serta ruang interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks transformasi digital, perpustakaan tidak lagi hanya berperan

sebagai penyedia koleksi bacaan, tetapi juga sebagai fasilitator literasi informasi, literasi digital, serta penguatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan. Perspektif global yang dikembangkan oleh UNESCO dan *International Federation of Library Associations and Institutions* menegaskan bahwa perpustakaan publik merupakan instrumen penting dalam pembangunan inklusif melalui peningkatan akses informasi, pemberdayaan komunitas, dan pengurangan kesenjangan social (Samon & Rukmana, 2025). Namun demikian, optimalisasi peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada wilayah pedesaan atau nagari yang memiliki keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Permasalahan tersebut juga tercermin pada kondisi perpustakaan umum di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan observasi lapangan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program, diperoleh data baseline yang menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih rendah. Rata-rata jumlah kunjungan tercatat sekitar 20–30 orang per minggu, dengan lebih dari 70% pengunjung berasal dari kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah. Partisipasi masyarakat umum, khususnya kelompok usia produktif dan orang dewasa, masih sangat terbatas yaitu kurang dari 15% dari total pengunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan belum berfungsi sebagai ruang pembelajaran masyarakat secara luas.

Dari sisi literasi masyarakat, hasil survei awal terhadap 50 responden menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% masyarakat yang memiliki kebiasaan membaca minimal satu buku per bulan, sementara 68% lainnya mengaku jarang atau tidak pernah membaca buku selain kebutuhan sekolah atau pekerjaan. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga masih tergolong rendah, di mana sekitar 57% responden menyatakan menggunakan internet lebih dominan untuk media sosial dan hiburan dibandingkan untuk pembelajaran atau pencarian informasi produktif. Sebanyak 62% responden juga menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan literasi atau pelatihan berbasis perpustakaan dalam satu tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas perpustakaan dengan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Dari aspek pengelolaan perpustakaan, kondisi awal menunjukkan bahwa koleksi buku yang tersedia sekitar 1.200 eksemplar dengan proporsi buku bacaan umum yang masih terbatas. Sistem pengelolaan masih dilakukan secara manual tanpa katalog digital terintegrasi, serta belum tersedia layanan berbasis teknologi seperti perpustakaan digital atau akses sumber belajar daring. Program kegiatan perpustakaan juga masih bersifat insidental dan belum berbasis analisis kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keterlibatan komunitas dalam kegiatan perpustakaan, di mana tingkat partisipasi kegiatan literasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya rata-rata kurang dari 25 peserta per kegiatan.

Secara analitis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut aspek inklusi sosial dan keterlibatan komunitas. Literatur internasional menegaskan bahwa keberhasilan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendekatan inklusi sosial (*social inclusion*) dan *community engagement*, yaitu kemampuan perpustakaan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang beragam serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, kajian perpustakaan di Indonesia masih didominasi pendekatan deskriptif mengenai kondisi layanan dan koleksi, sehingga belum banyak mengembangkan model pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat yang kontekstual dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, model pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement* yang dikembangkan berdasarkan data lapangan spesifik serta diterapkan melalui pendekatan *problem-based* pada konteks nagari.

Berdasarkan data baseline dan analisis situasi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) rendahnya tingkat kunjungan dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat umum; (2) rendahnya tingkat literasi membaca dan literasi digital masyarakat; (3) keterbatasan program perpustakaan yang berbasis kebutuhan masyarakat; (4) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan; serta (5) rendahnya keterlibatan komunitas dalam kegiatan perpustakaan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan belum berfungsi sebagai ruang sosial inklusif yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kondisi eksisting pemanfaatan perpustakaan dan literasi masyarakat berdasarkan data baseline, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat, serta bagaimana strategi pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement* yang efektif dalam meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat di era digital. Tujuan operasional kegiatan ini adalah menganalisis kondisi awal pemanfaatan perpustakaan dan tingkat literasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan dan mengimplementasikan model pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement* yang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki urgensi yang kuat karena didasarkan pada data baseline lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi perpustakaan dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Pendekatan *problem-based* yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan solusi yang kontekstual sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pemberdayaan perpustakaan berbasis komunitas pada wilayah nagari atau desa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masalah (*problem-based participatory approach*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan pengelola perpustakaan sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi mitra berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat, rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan, serta belum optimalnya partisipasi komunitas dalam kegiatan literasi berbasis perpustakaan. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Chambers, 2014). Selain itu, kolaborasi antara akademisi, pustakawan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat (IFLA, 2015).

Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Umum Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Informan berfungsi untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam mengenai kondisi awal perpustakaan, permasalahan pengelolaan, serta dukungan kelembagaan terhadap program pemberdayaan. Informan dalam kegiatan ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu: Informan utama berasal dari pengelola perpustakaan karena mereka merupakan pihak yang memahami kondisi operasional, fasilitas, program layanan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan. Jumlah informan pada kelompok ini sebanyak 2 orang yang meliputi kepala/pengelola perpustakaan dan staf administrasi. Informan selanjutnya dari unsur pemerintah nagari diperlukan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, dukungan kelembagaan, serta program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan. Informan terdiri atas 1 orang perangkat nagari yang membidangi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain informan tersebut, masyarakat nagari berperan sebagai partisipan kegiatan sekaligus responden. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran

strategis perpustakaan umum dalam meningkatkan literasi informasi dan literasi digital masyarakat (Perpustakaan Nasional RI, 2019).

Telaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan dan identifikasi kebutuhan, (2) perancangan program pemberdayaan, (3) implementasi kegiatan, serta (4) evaluasi dan keberlanjutan program. Tahap pertama adalah persiapan dan identifikasi kebutuhan (*needs assessment*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data baseline melalui observasi kondisi perpustakaan, wawancara dengan pengelola perpustakaan dan perangkat nagari, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kunjungan perpustakaan, tingkat literasi membaca, tingkat literasi digital masyarakat, kebutuhan pelatihan, serta hambatan partisipasi masyarakat. Data baseline ini menjadi dasar dalam penyusunan program serta pembandingan dalam evaluasi dampak kegiatan.

Tahap kedua adalah perancangan program pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement*. Program dirancang secara kolaboratif antara tim pengabdian, pengelola perpustakaan, pemerintah nagari, dan masyarakat. Kegiatan yang dirancang meliputi penguatan kapasitas pengelola perpustakaan, pelatihan literasi digital masyarakat, pengembangan kegiatan peningkatan minat baca, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan. Prinsip inklusi sosial diterapkan dengan memastikan seluruh kelompok masyarakat dapat mengakses program, sedangkan pendekatan *community engagement* diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tahap ketiga adalah implementasi program yang mencakup pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi bagi pengelola, pelatihan literasi digital bagi masyarakat, kegiatan peningkatan minat baca seperti kelas literasi dan pojok baca, serta pendampingan pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang kegiatan komunitas. Selain itu, dilakukan pengembangan sistem administrasi perpustakaan sederhana berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Pendampingan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program. Tahap keempat adalah evaluasi dan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih jauh pandangan pustakawan maupun masyarakat mengenai efektivitas sosialisasi inklusif yang telah dijalankan. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung dalam kegiatan sosialisasi, sehingga dapat memahami dinamika interaksi, strategi komunikasi, serta respon peserta secara nyata. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri arsip, laporan kegiatan, serta publikasi resmi perpustakaan umum yang relevan dengan program sosialisasi (Miles et al., 2020). Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan saling melengkapi (Flick, 2020). Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid (Creswell, 2018).

Proses analisis dimulai dengan mentranskripsikan seluruh hasil wawancara dan diskusi secara verbatim untuk menjaga keutuhan informasi yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean (*coding*) secara bertahap. Pada tahap awal digunakan *open coding* untuk mengidentifikasi unit-unit informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti kondisi pengelolaan perpustakaan, hambatan pemanfaatan layanan, kebutuhan masyarakat terhadap literasi digital, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan yang dirasakan setelah program dilaksanakan. Setelah itu dilakukan *axial coding* untuk mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori yang lebih besar, seperti faktor internal perpustakaan, faktor eksternal masyarakat, bentuk intervensi program, dan dampak kegiatan terhadap literasi dan partisipasi masyarakat.

Tahap berikutnya adalah analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola hubungan antar kategori sehingga diperoleh tema-tema utama yang menjelaskan dinamika pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan *community engagement*. Interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam kegiatan, sehingga dapat dijelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dan pendekatan partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan pemanfaatan perpustakaan.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, dilakukan teknik triangulasi melalui beberapa cara. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola perpustakaan, pemerintah nagari, dan masyarakat peserta kegiatan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, dilakukan member check dengan mengonfirmasi hasil temuan sementara kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan kondisi nyata di lapangan. Diskusi antar tim pengabdian (*peer debriefing*) juga dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas dalam proses analisis.

Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini ditetapkan secara terukur dengan mengacu pada kondisi baseline awal serta target perubahan yang diharapkan setelah program dilaksanakan. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari perubahan pengetahuan, perilaku, serta pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Indikator tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan perpustakaan umum sebagai agen peningkatan literasi dan inklusi sosial (Perpustakaan Nasional RI, 2019). Adapun indikator keberhasilan kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang literasi digital
Keberhasilan diukur ditunjukkan melalui perubahan persepsi, kemampuan menjelaskan kembali materi, serta peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan layanan digital perpustakaan berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi selama pelatihan, dan dokumentasi.
2. Bertambahnya jumlah pengguna layanan perpustakaan digital
Indikator ini diukur melalui data administrasi perpustakaan, yaitu jumlah masyarakat yang mengakses layanan digital, menggunakan katalog elektronik, atau memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi. Target keberhasilan ditetapkan berupa peningkatan jumlah pengguna minimal 50% dibandingkan sebelum program, serta adanya minimal 30 pengguna aktif dalam periode evaluasi awal setelah implementasi sistem.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi
Partisipasi diukur dari jumlah kehadiran masyarakat dalam kegiatan literasi, pelatihan, atau aktivitas perpustakaan berbasis komunitas. Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan jumlah peserta minimal 60% dibandingkan kegiatan sebelumnya, serta keterlibatan masyarakat lintas kelompok usia (anak, remaja, dan dewasa) dengan proporsi peserta dewasa minimal 30% dari total peserta.
4. Optimalisasi peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat
Indikator ini diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan minimal 50% dibandingkan kondisi awal.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi inklusif yang dilakukan perpustakaan umum memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat di era digital. Perpustakaan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, ruang pembelajaran, dan sarana pemberdayaan masyarakat (Putra & Nurjanah, 2021). Melalui pendekatan inklusif, perpustakaan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terlayani, seperti pelajar dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah pinggiran (Sari, 2022).

Inovasi yang dilakukan perpustakaan dalam kegiatan sosialisasi ini mencakup pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan komunitas, serta penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini (Wulandari, 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi inklusif telah mendorong transformasi signifikan dalam pola interaksi masyarakat dengan perpustakaan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan, keterlibatan aktif dalam program literasi digital, serta semakin luasnya jaringan kolaborasi antara perpustakaan dengan berbagai pihak (Fauzi & Lestari, 2020). Dengan demikian, perpustakaan umum tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu membangun budaya literasi dan meningkatkan partisipasi publik secara lebih merata (S. Hidayat, 2024).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 45 hari di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung menunjukkan adanya perubahan empiris terhadap tingkat kunjungan perpustakaan serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi berbasis digital. Analisis dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal (*baseline*) sebelum kegiatan dengan data monitoring selama program berlangsung.

1. Peningkatan Kunjungan dan Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan data administrasi perpustakaan dan hasil observasi awal, sebelum kegiatan dilaksanakan jumlah kunjungan masyarakat masih tergolong rendah, yaitu rata-rata 22–25 pengunjung per minggu atau sekitar 95 pengunjung per bulan. Pengunjung didominasi oleh anak sekolah, sedangkan masyarakat dewasa masih relatif jarang memanfaatkan layanan perpustakaan. Setelah dilakukan intervensi berupa pelatihan literasi digital, pendampingan penggunaan layanan perpustakaan, serta kegiatan literasi komunitas, jumlah kunjungan mengalami peningkatan secara bertahap selama periode pelaksanaan program.

Tabel 1. Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Selama Program (45 Hari)

Periode	Rata-rata Pengunjung/Minggu	Persentase Peningkatan
Sebelum program	24 orang	—
Minggu 1–2	31 orang	+29,2%
Minggu 3–4	37 orang	+54,2%
Minggu 5–6	42 orang	+75,0%

Dalam waktu 45 hari terjadi peningkatan kunjungan sebesar 75% dibandingkan kondisi awal. Peningkatan mulai terlihat setelah kegiatan pelatihan literasi digital pada minggu pertama dan semakin meningkat setelah adanya pendampingan praktik penggunaan layanan perpustakaan. Secara analitis, peningkatan ini menunjukkan bahwa hambatan utama pemanfaatan perpustakaan sebelumnya bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga rendahnya literasi digital dan kurangnya keterlibatan sosial masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh pengalaman langsung melalui pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan perilaku dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Literasi

Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Partisipasi Aktif
Pelatihan Literasi Digital	28 orang	86%
Pendampingan Praktik	25 orang	84%
Kegiatan Literasi Komunitas	22 orang	78%

Tingkat partisipasi aktif yang tinggi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan motivasi keterlibatan. Peserta tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat dalam praktik penggunaan layanan perpustakaan. Hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap perpustakaan setelah kegiatan berlangsung. Sebelum program, masyarakat lebih memandang perpustakaan sebagai tempat belajar anak sekolah, sedangkan setelah kegiatan mereka mulai memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi bagi kebutuhan sehari-hari. Beberapa kutipan wawancara peserta antara lain:

“Biasanya yang ke perpustakaan hanya anak-anak. Sekarang saya juga sering datang karena sudah tahu cara mencari informasi di internet.”

“Setelah diajarkan, saya jadi berani mencoba sendiri pakai layanan digital di perpustakaan.”

“Kegiatannya menarik, jadi kami merasa ada manfaat kalau datang ke perpustakaan.”

“Sekarang lebih ramai dibanding dulu. Banyak orang tua juga ikut datang.”

Kutipan tersebut menunjukkan perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan kepercayaan diri masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Peningkatan kunjungan sebesar 75% dalam waktu 45 hari menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis masalah efektif dalam meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. Program yang melibatkan masyarakat secara langsung menciptakan rasa kepemilikan terhadap perpustakaan sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif. Selain itu, kegiatan literasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi kunjungan. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada strategi pemberdayaan yang partisipatif dan kontekstual. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan perpustakaan berbasis literasi digital mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dari rata-rata 24 orang menjadi 42 orang per minggu, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi selama periode pelaksanaan 45 hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan sosialisasi inklusif terbukti efektif dalam menarik minat masyarakat untuk lebih dekat dengan perpustakaan. Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung meningkat secara signifikan setelah program sosialisasi dilaksanakan (Setiawan, 2021). Tidak hanya peningkatan dalam hal jumlah, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif. Masyarakat mulai terlibat dalam berbagai program, seperti diskusi buku, kelas literasi digital, hingga kegiatan berbasis komunitas yang diselenggarakan di perpustakaan (Pratiwi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pendekatan inklusif mampu menciptakan suasana yang ramah dan terbuka sehingga mendorong masyarakat untuk datang dan berpartisipasi.

Selain itu, peningkatan keterlibatan masyarakat juga terlihat dari bertambahnya relawan dan mitra komunitas yang ingin berkolaborasi dengan perpustakaan (Rahmawati, 2022). Perpustakaan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial yang hidup. Dengan adanya kolaborasi ini, kegiatan perpustakaan menjadi lebih variatif, inovatif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Hal ini sekaligus menegaskan posisi perpustakaan umum sebagai pusat inklusi sosial yang mampu membangun partisipasi kolektif (Kurniawan, 2021).

2. Literasi Digital sebagai Dampak Utama Sosialisasi Inklusif

Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu dampak utama dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan berbasis inklusif yang dilaksanakan selama 45 hari di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung. Evaluasi kompetensi digital dilakukan secara kualitatif melalui observasi praktik peserta selama pelatihan, wawancara mendalam, serta dokumentasi perubahan perilaku dalam memanfaatkan

layanan perpustakaan.

Hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum intervensi, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital secara mandiri, khususnya dalam mengakses informasi melalui internet dan menggunakan layanan perpustakaan digital. Peserta cenderung pasif, ragu mencoba, serta memiliki ketergantungan pada bantuan orang lain. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan perilaku yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan praktik mandiri, keberanian mencoba fitur baru, serta pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai sumber informasi. Peserta mulai menunjukkan inisiatif untuk mencari informasi sendiri tanpa pendampingan langsung. Perubahan tersebut terlihat dari hasil wawancara peserta sebagai berikut:

“Sebelumnya saya tidak berani mencoba karena takut salah. Setelah diajarkan pelan-pelan, sekarang saya sudah bisa sendiri.”

“Dulu saya pikir internet itu sulit. Setelah ikut kegiatan ini ternyata bisa dipelajari kalau ada yang membimbing.”

“Sekarang saya kalau butuh informasi tidak selalu tanya orang lain, tapi coba cari sendiri dulu.”

“Saya jadi tahu kalau perpustakaan bukan hanya buku, tapi juga bisa belajar pakai teknologi.”

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada tiga aspek utama kompetensi digital, yaitu pengetahuan, keterampilan praktik, dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Secara analitis, peningkatan literasi digital masyarakat dapat dijelaskan melalui pendekatan sosialisasi inklusif yang menekankan proses belajar partisipatif dan berbasis kebutuhan. Metode pendampingan langsung memungkinkan peserta belajar sesuai tingkat kemampuan masing-masing, sehingga hambatan psikologis seperti rasa takut atau kurang percaya diri dapat dikurangi.

Perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek keterampilan teknis, tetapi juga pada pola pikir masyarakat terhadap teknologi. Sebelum kegiatan, teknologi cenderung dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan hanya dapat digunakan oleh kelompok tertentu. Setelah kegiatan, masyarakat mulai melihat teknologi sebagai alat yang dapat membantu aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengakses informasi dan layanan perpustakaan. Kegiatan sosialisasi inklusif mampu menghasilkan perubahan kompetensi digital masyarakat yang nyata dalam waktu relatif singkat. Perubahan tersebut meliputi:

1. Meningkatnya kemampuan praktik penggunaan teknologi secara mandiri.
2. Bertambahnya kepercayaan diri masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.
3. Perubahan persepsi terhadap perpustakaan sebagai pusat pembelajaran berbasis teknologi.
4. Meningkatnya inisiatif masyarakat dalam mencari informasi secara mandiri.

Hasil ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan dampak utama dari pemberdayaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari kemampuan teknis peserta, tetapi juga dari perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai sumber pembelajaran yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan salah satu dampak penting dari program sosialisasi inklusif yaitu meningkatnya literasi digital masyarakat. Perpustakaan menyediakan fasilitas komputer, akses internet gratis, serta pelatihan penggunaan aplikasi pembelajaran digital (Nugroho & Safitri, 2022). Melalui fasilitas ini, masyarakat yang sebelumnya kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi, mulai terbiasa menggunakan perangkat digital untuk membaca buku elektronik, mencari sumber belajar daring, hingga mengikuti kelas virtual. Keberhasilan ini menegaskan bahwa perpustakaan mampu

menjawab tantangan literasi di era digital dengan pendekatan yang tepat (Suryani, 2025). Selain menyediakan sarana, pustakawan juga berperan sebagai fasilitator dalam mendampingi masyarakat memanfaatkan teknologi digital (Andriani, 2021). Hal ini membantu mengurangi kesenjangan digital, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang mendapatkan akses teknologi. Dengan demikian, perpustakaan umum berhasil menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kompetensi digital masyarakat yang lebih inklusif (Fadilah, 2024).

3. Transformasi Perpustakaan sebagai Ruang Inklusif dan Sosial

Transformasi perpustakaan sebagai ruang inklusif dan sosial merupakan salah satu dampak penting dari pelaksanaan kegiatan pengabdian di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada fungsi sosial perpustakaan yang semakin berkembang sebagai ruang interaksi, pembelajaran bersama, dan kegiatan komunitas masyarakat.

Sebelum program dilaksanakan, perpustakaan lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat peminjaman buku oleh anak sekolah. Aktivitas masyarakat dewasa masih sangat terbatas, dan belum terdapat kegiatan literasi berbasis komunitas yang rutin. Setelah intervensi berupa pelatihan, pendampingan, dan kegiatan literasi komunitas, perpustakaan mulai berfungsi sebagai ruang sosial yang lebih inklusif dengan keterlibatan masyarakat lintas usia. Perubahan ini dapat dilihat pada peningkatan jenis aktivitas yang berlangsung di perpustakaan selama program.

Tabel 3. Perubahan Aktivitas Perpustakaan Sebelum dan Sesudah Program

Aspek	Sebelum Program	Sesudah Program
Jenis kegiatan	Peminjaman buku	Pelatihan digital, belajar bersama, diskusi
Kelompok pengguna	Anak sekolah dominan	Anak, remaja, dan orang dewasa
Frekuensi kegiatan komunitas	Tidak rutin	1–2 kali per minggu
Interaksi sosial di perpustakaan	Rendah	Meningkat
Pemanfaatan teknologi	Sangat terbatas	Mulai digunakan masyarakat

Berdasarkan table 4 di atas, data tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi perpustakaan dari ruang layanan pasif menjadi ruang interaksi sosial yang aktif. Secara interpretatif, perubahan ini menandakan munculnya proses inklusi sosial, di mana masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat mulai memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan fasilitas publik. Beberapa kutipan wawancara yang mendukung temuan tersebut antara lain:

“Sekarang perpustakaan tidak sepi lagi. Banyak kegiatan, jadi kami merasa lebih nyaman datang.”

“Dulu hanya anak-anak yang ke sini, sekarang orang tua juga ikut belajar.”

“Kami merasa perpustakaan jadi tempat berkumpul untuk belajar bersama, bukan hanya pinjam buku.”

Secara kritis, transformasi perpustakaan sebagai ruang inklusif tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya fasilitas atau teknologi. Perubahan terjadi karena adanya intervensi sosial berupa pendampingan partisipatif yang mendorong masyarakat untuk merasa memiliki ruang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas perpustakaan lebih dipengaruhi oleh strategi pemberdayaan dibandingkan faktor infrastruktur semata.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dewasa menjadi indikator penting keberhasilan transformasi inklusif. Sebelum program, dominasi pengguna anak sekolah menunjukkan adanya kesenjangan akses berdasarkan usia. Setelah program, keterlibatan lintas kelompok usia menunjukkan berkurangnya kesenjangan tersebut. Pelaksanaan kegiatan di perpustakaan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Perpustakaan Umum Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung



Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang inklusi sosial apabila didukung oleh strategi pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Transformasi sosial yang terjadi juga memperkuat bahwa perpustakaan memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran masyarakat di wilayah pedesaan, selama terdapat intervensi yang mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Namun demikian, transformasi yang terjadi masih berada pada tahap awal. Keberlanjutan fungsi perpustakaan sebagai ruang sosial sangat bergantung pada konsistensi kegiatan komunitas setelah program selesai. Tanpa keberlanjutan kegiatan, terdapat potensi penurunan partisipasi masyarakat kembali seperti kondisi awal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan program sosialisasi inklusif juga telah mentransformasi perpustakaan umum menjadi ruang sosial yang ramah bagi semua kalangan (Hakim & Syafitri, 2020). Perpustakaan kini dipandang sebagai tempat untuk belajar bersama, berdiskusi, hingga berkegiatan kreatif. Lingkungan yang inklusif membuat kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, maupun anak-anak dari keluarga kurang mampu merasa diterima (Mulyani, 2022). Berbagai fasilitas pendukung seperti koleksi braille, layanan pendampingan, hingga ruang kreatif menjadi bukti nyata upaya perpustakaan dalam mengakomodasi kebutuhan yang beragam.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, tetapi juga memperkuat perannya dalam membangun kohesi sosial. Perpustakaan menjadi ruang netral yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memperluas wawasan (Firmansyah, 2021). Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat secara intelektual, tetapi juga mempererat hubungan sosial melalui pendekatan inklusif (Susanti, 2024). Adapun perpustakaan sebagai ruang inklusif dan social dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

4. Tantangan dalam Implementasi Sosialisasi Inklusif

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi inklusif dalam pemberdayaan perpustakaan di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan perpustakaan.

Identifikasi tantangan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan peserta, serta diskusi dengan pengelola perpustakaan sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif melalui triangulasi sumber data.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya kompetensi awal masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital, memahami fungsi aplikasi, serta mengakses informasi melalui internet secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran berlangsung lebih lambat dari perencanaan karena fasilitator harus memberikan pendampingan secara individual kepada peserta dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Temuan observasi tersebut diperkuat oleh pernyataan peserta yang mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya dan merasa ragu untuk mencoba teknologi tanpa pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan kompetensi digital menjadi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas sosialisasi inklusif di tingkat masyarakat.

Selain faktor kompetensi, keterbatasan sarana dan infrastruktur juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Jumlah perangkat komputer yang terbatas menyebabkan peserta harus menggunakan perangkat secara bergantian selama kegiatan praktik. Kondisi jaringan internet yang tidak selalu stabil juga memengaruhi kelancaran proses pembelajaran, terutama saat peserta mencoba mengakses layanan perpustakaan digital secara langsung. Hambatan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kegiatan pelatihan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat setelah program selesai. Pengelola perpustakaan juga mengonfirmasi bahwa keterbatasan fasilitas merupakan kendala utama dalam pengembangan layanan berbasis teknologi di tingkat nagari.

Meskipun banyak capaian positif, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi sosialisasi inklusif. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan, fasilitas, maupun tenaga pustakawan (Wibowo, 2020). Tidak semua perpustakaan memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk menyediakan fasilitas digital canggih atau mengadakan program berskala besar. Kondisi ini membuat beberapa kegiatan terhambat dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Santoso, 2021).

Tantangan lain datang dari rendahnya minat sebagian masyarakat yang masih menganggap perpustakaan sebagai tempat yang membosankan dan kuno (Yuliani, 2023). Pandangan ini membuat sosialisasi yang dilakukan terkadang tidak sepenuhnya berhasil menarik minat masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang kreatif, misalnya dengan memanfaatkan media sosial, mengadakan kegiatan berbasis budaya populer, atau melibatkan influencer lokal (Azizah & Ramadhan, 2024). Upaya ini dapat membantu mengubah citra perpustakaan menjadi lebih modern, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Berikut gambaran dari Skema Implementasi Sosialisasi Inklusif Perpustakaan Umum :

5. Prospek Pengembangan Sosialisasi Inklusif di Era Digital

Prospek pengembangan sosialisasi inklusif kedepannya di perpustakaan umum sangat menjanjikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perpustakaan memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan melalui platform daring (Amalia, 2022). Layanan literasi virtual, diskusi buku online, hingga pameran digital dapat dihadirkan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini tentu akan memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang adaptif terhadap perkembangan zaman (M. Putri & Hidayah, 2023).

Selain itu, keberlanjutan sosialisasi inklusif dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun organisasi

masyarakat sipil (Rahayu, 2024). Kolaborasi semacam ini akan meningkatkan kualitas program, memperluas cakupan kegiatan, serta memperkuat posisi perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial di era digital. Dengan langkah tersebut, perpustakaan umum tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat (P. Lestari, 2025).

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perpustakaan melalui sosialisasi inklusif berbasis literasi digital di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa intervensi berbasis partisipasi masyarakat mampu menghasilkan perubahan yang nyata dalam waktu relatif singkat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kunjungan perpustakaan dari rata-rata 24 orang menjadi 42 orang per minggu atau meningkat sekitar 75% selama periode pelaksanaan 45 hari. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan partisipasi aktif lintas kelompok usia, termasuk masyarakat dewasa yang sebelumnya relatif jarang memanfaatkan layanan perpustakaan.

Dari aspek kompetensi, kegiatan sosialisasi inklusif berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat secara kualitatif, yang ditunjukkan melalui perubahan kemampuan praktik, meningkatnya kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, serta bertambahnya inisiatif masyarakat dalam mengakses informasi secara mandiri. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada perubahan persepsi masyarakat terhadap perpustakaan sebagai ruang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Perpustakaan yang sebelumnya berfungsi secara pasif sebagai tempat peminjaman buku mulai mengalami transformasi menjadi ruang sosial inklusif yang mendukung interaksi, pembelajaran bersama, dan aktivitas komunitas.

Saran yang dapat diberikan adalah program literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendampingan rutin agar perubahan perilaku masyarakat lebih stabil. Perpustakaan perlu menambah fasilitas perangkat digital dan akses internet untuk mendukung kegiatan literasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, dan relawan teknologi perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan program. Evaluasi kegiatan sebaiknya mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar dampak program dapat terukur lebih komprehensif.

Implikasinya hasil kegiatan ini menegaskan bahwa perpustakaan memiliki potensi strategis sebagai pusat pembelajaran masyarakat berbasis inklusi sosial. Pendekatan sosialisasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi model implementasi program literasi digital di wilayah lain, khususnya pada komunitas dengan tingkat literasi teknologi yang masih beragam. Program serupa juga berpotensi mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi transformasi digital secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Referensi

- Amalia, R. (2022). Digitalisasi layanan perpustakaan umum di era society 5.0. *Jurnal Pustaka*, 18(2), 101–113.
- Andriani, T. (2021). Peran pustakawan sebagai fasilitator literasi digital masyarakat. *Jurnal Ilmu Informasi*, 7(1), 55–68.
- Azizah, N., & Ramadhan, M. (2024). Strategi komunikasi kreatif perpustakaan untuk generasi milenial. *Jurnal Literasi*, 12(1), 45–60.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Deswita, R., Nasution, E.Y.P. and Yulia, P., 2021. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berupa Skripsi Dengan Materi Penelitian Korelasional. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp.34-42.

- Fadilah, N. (2024). Inklusi digital di perpustakaan umum: Peluang dan tantangan. *Jurnal Transformasi Perpustakaan*, 6(2), 88–97.
- Fatmawati, E. (2022). Peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Melalui Pengukuran Indeks Gemar Membaca (IGM). *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(2), 341-358.
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2020). Perpustakaan umum sebagai agen perubahan sosial. *Jurnal Kajian Sosial*, 5(1), 33–44.
- Firmansyah, B. (2021). Perpustakaan inklusif: Ruang netral untuk masyarakat. *Jurnal Informasi Publik*, 9(2), 122–134.
- Flick, U. (2020). *Introducing Research Methodology: Thinking Your Way Through Your Research Project* (3rd ed.). Sage.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2021). *Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences*. Sage.
- Hakim, R., & Syafitri, L. (2020). Transformasi fungsi perpustakaan di era digital. *Jurnal Pustaka Nusantara*, 15(3), 66–77.
- Hidayat, R. (2024). Perpustakaan inklusif dan peranannya dalam penguatan literasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 10(2), 112–125.
- Hidayat, S. (2024). Literasi inklusif untuk masyarakat digital. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 89–101.
- Kurniawan, A. (2021). Kolaborasi komunitas dengan perpustakaan umum. *Jurnal Masyarakat Informasi*, 10(1), 14–25.
- Lestari, N. (2021). Transformasi perpustakaan umum di era digital. *Jurnal Pustaka Masyarakat*, 8(1), 45–57.
- Lestari, P. (2025). Pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial. *Jurnal Literasi Digital*, 11(2), 150–165.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyani, E. (2022). Layanan inklusif di perpustakaan untuk kelompok rentan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 4(2), 75–84.
- Nugroho, Y., & Safitri, D. (2022). Pelatihan literasi digital di perpustakaan umum. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan*, 7(3), 177–190.
- Pratiwi, S. (2022). Kegiatan literasi digital di perpustakaan kota. *Jurnal Pendidikan Literasi*, 6(1), 22–34.
- Putra, A., & Nurjanah, N. (2021). Perpustakaan sebagai ruang interaksi sosial. *Jurnal Pustaka Indonesia*, 13(1), 45–58.
- Putri, A., & Santoso, D. (2023). Pemanfaatan media digital dalam sosialisasi perpustakaan umum. *Jurnal Literasi Digital*, 5(3), 76–88.
- Putri, M., & Hidayah, F. (2023). Prospek layanan literasi virtual perpustakaan. *Jurnal Perpustakaan Digital*, 8(2), 200–212.
- Rahayu, S. (2024). Kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan perpustakaan inklusif. *Jurnal Inklusi Sosial*, 9(1), 134–148.
- Rahmawati, S. (2022). Efektivitas sosialisasi perpustakaan dalam meningkatkan kunjungan masyarakat. *Jurnal Komunikasi Dan Informasi*, 12(4), 98–110.
- Samon, C. M. S., & Rukmana, E. N. (2025). Menjaga Memori, Merawat Budaya, Menuju SDGS: Peran Transformasional Perpustakaan Di Era Modern: Peran Transformasional Perpustakaan di Era Modern. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 7(1), 42-47.
- Santoso, I. (2021). Hambatan implementasi program inklusif di perpustakaan. *Jurnal Pustaka Daerah*, 3(2), 56–70.
- Sari, D. (2022). Akses layanan perpustakaan bagi masyarakat pinggiran. *Jurnal Kajian Inklusi*,

6(1), 89–101.

Setiawan, H. (2021). Dampak sosialisasi perpustakaan terhadap jumlah pengunjung. *Jurnal Perpustakaan Umum*, 5(3), 77–88.

Suryani, M. (2025). Perpustakaan umum sebagai ruang sosial di era digital. *Jurnal Kajian Informasi*, 7(1), 1–15.

Susanti, I. (2024). Perpustakaan dan kohesi sosial masyarakat. *Jurnal Humaniora*, 12(2), 141–153.

Wibowo, T. (2020). Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan perpustakaan. *Jurnal Informasi Dan Dokumentasi*, 6(1), 33–45.

Wulandari, R. (2023). Inovasi program perpustakaan berbasis kebutuhan masyarakat. *Jurnal Inovasi Layanan*, 5(2), 66–78.